

RENCANA STRATEGIS

DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA PEKALONGAN

2025-2029



DINSOSP2KB KOTA PEKALONGAN

 Jalan Sriwijaya No. 40 Kota Pekalongan

 dinsosp2kb.pekalongankota.go.id

 (0285) 422868

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT bahwa dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan Tahun 2025-2029. Rencana Strategis (Renstra) DinsosP2KB Kota Pekalongan merupakan dokumen perencanaan dan pedoman bagi DinsosP2KB untuk 5 (lima) periode ke depan sebagai perwujudan tujuan yang sudah ditetapkan guna mendukung visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih.

Renstra memuat tujuan, sasaran, serta Program dan Kegiatan yang menjadi kewajiban DinsosP2KB sebagai leading sektor dalam urusan Sosial dan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kota Pekalongan. Dokumen Renstra ini disusun dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra dan mengakomodir kebijakan pusat dan/ atau Provinsi Jawa Tengah, penyesuaian terhadap RPJMD Kota Pekalongan, penyesuaian indikator serta penyesuaian hasil review Inspektorat.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) ini masih jauh dari sempurna, sehingga kritik, saran dan masukan-masukan untuk perbaikan senantiasa kami harapkan, kami juga menyampaikan ucapan terima kasih pada semua pihak yang telah membantu dan berperan aktif dalam penyusunan Renstra ini, semoga ini dapat digunakan sebagai acuan dalam memberikan pelayanan sosial serta pelayanan KB kepada masyarakat ke depan. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan bimbingan dan kekuatan kepada kita dalam melaksanakan tugas yang mulia ini.

Pekalongan, 19 September 2025
Kepala Dinas Sosial, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
Kota Pekalongan



YOS ROSYIDI S.I.P., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19660516 198603 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra.....	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DINSOSP2KB) KOTA PEKALONGAN.....	10
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	10
2.1.1 Tugas, Fungsi dan struktur organisasi.....	10
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	20
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	22
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan	28
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	32
2.2.1. Permasalahan Pelayanan DinsosP2KB	32
2.2.2. Isu Strategis.....	35
BAB III TUJUAN, SASARAN , STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	37
3.1 Tujuan Renstra DinsosP2KB Tahun 2025 - 2029.....	37
3.2 Sasaran Renstra DinsosP2KB Tahun 2025 – 2029.....	37
3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran renstra DinsosP2KB Tahun 2025 - 2029	40
3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran renstra DinsosP2KB Tahun 2025 – 2029	42
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	44
4.1 Uraian Program.....	44

4.2	Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan Pendanaan	45
4.3	Daftar SubKegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	76
4.4.	Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025- 2029 melalui Indikator Utama Pembangunan	76
4.5.	Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025- 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	77
4.6	Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025- 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).....	77
4.7	Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025- 2029 melalui Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	79
BAB V PENUTUP		84

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Jumlah dan Tingkat Pendidikan Pegawai DinsosP2KB Kota Pekalongan..	21
Tabel 2. 2 Komposisi Pegawai DinsosP2KB Kota Pekalongan	21
Tabel 2. 3 Prasarana dan Sarana DINSOSP2KB Kota Pekalongan	22
Tabel 2. 4 Pencapaian Kinerja DinsosP2KB Kota Pekalongan.....	23
Tabel 2. 5 Pencapaian Realisasi Keuangan DinsosP2KB Kota Pekalongan.....	27
Tabel 2. 6 Capaian SPM DinsosP2KB Tahun 2024.....	28
Tabel 2. 7 Pemetaan Permasalahan	33
Tabel 2. 8 Isu Strategis DinsosP2KB.....	35
Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Renstra DinsosP2KB 2025 – 2029	38
Tabel 3. 2 Strategi Renstra DinsosP2KB 2025 - 2029	40
Tabel 3. 3 Arah Kebijakan Renstra DinsosP2KB 2025 - 2029	42
Tabel 4. 1 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan	46
Tabel 4. 2 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	76
Tabel 4. 3 Indikator Utama Pembangunan (IUP) DinsosP2KB.....	76
Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Utama (IKU) DinsosP2KB	77
Tabel 4. 5 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	77
Tabel 4. 6 Indikator Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) DinsosP2KB ..	79
Tabel 4. 7 Indikator yang mendukung Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi .	83

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Bagan Susunan Organisasi DINSOSP2KB Kota Pekalongan	12
---	----

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan pengendalian penduduk merupakan dua aspek krusial dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan. Kota Pekalongan, sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi dan sosial di Jawa Tengah, menghadapi tantangan dalam optimalisasi kesejahteraan sosial dan pengendalian penduduk. Oleh karena itu, Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P2KB) memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa program dan kebijakan yang dijalankan selaras dengan kebutuhan masyarakat serta sejalan dengan regulasi yang berlaku.

Secara regulatif, penyelenggaraan kesejahteraan sosial diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, yang menegaskan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan dan pelayanan sosial kepada masyarakat, terutama bagi kelompok rentan seperti Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), yang mencakup anak terlantar, penyandang disabilitas, lansia, keluarga miskin, dan kelompok marginal lainnya. Selain itu, dalam aspek pengendalian penduduk, Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga serta Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting menjadi pedoman dalam pengelolaan pertumbuhan penduduk yang lebih terkendali dan berkualitas.

Namun, di Kota Pekalongan, masih terdapat berbagai tantangan yang perlu mendapatkan perhatian serius. Dari sisi kesejahteraan sosial, masih banyak kelompok rentan yang belum memperoleh akses perlindungan sosial secara optimal. Data dari DinsosP2KB menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan dan ketimpangan ekonomi masih menjadi masalah utama yang memerlukan intervensi berkelanjutan. Selain itu, keterbatasan akses terhadap layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi, turut menjadi faktor penghambat peningkatan kesejahteraan sosial di Kota Pekalongan.

Sementara itu, dalam aspek pengendalian penduduk, laju pertumbuhan penduduk di Kota Pekalongan masih cukup tinggi dibandingkan dengan daya dukung wilayah. Hal ini diperburuk oleh masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam program Keluarga Berencana (KB), tingginya angka pernikahan usia dini, serta meningkatnya angka stunting yang menjadi indikasi belum optimalnya pemenuhan gizi bagi ibu dan anak. Tantangan ini menuntut pendekatan strategis yang lebih terarah untuk menciptakan keluarga yang lebih sejahtera dan berdaya.

Dalam menghadapi permasalahan tersebut, diperlukan perencanaan strategis yang komprehensif dan berbasis data guna memastikan efektivitas program dan kebijakan yang diimplementasikan. Oleh karena itu, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) DinsosP2KB Kota Pekalongan menjadi langkah penting dalam merumuskan arah kebijakan, strategi, dan program kerja yang dapat menjawab tantangan kesejahteraan sosial dan pengendalian penduduk di Kota Pekalongan.

Renstra ini akan berfokus pada:

1. Peningkatan kesejahteraan sosial melalui penguatan program perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi bagi kelompok rentan, serta peningkatan akses layanan dasar.
2. Optimalisasi pengendalian penduduk dengan memperkuat layanan KB, edukasi kesehatan reproduksi, pencegahan pernikahan dini, serta percepatan penurunan stunting.
3. Kolaborasi lintas sektor dengan melibatkan pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat dalam mendukung program kesejahteraan sosial dan pengendalian penduduk.

Dengan adanya Renstra ini, diharapkan kebijakan dan program yang diimplementasikan dapat lebih tepat sasaran, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Pekalongan secara menyeluruh. Dukungan dari seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci dalam mewujudkan Kota Pekalongan yang lebih sejahtera, inklusif, dan memiliki pertumbuhan penduduk yang terkendali. Selanjutnya bersamaan dengan penyusunan RPJMD

Kota Pekalongan tahun 2025-2029, maka perlu dilakukan Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan Tahun 2025-2029, berlandaskan pada :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang tentang kesejahteraan sosial (Lembaran Negara Republik Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397)
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 12. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Pekalongan dengan Kabupaten Dati II Pekalongan, dan Kabupaten Dati II Batang, (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

22. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
27. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 159);
29. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 14);
30. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 1);

31. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2017 Nomor 9);
32. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekalongan Nomor 26)
33. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024 Nomor 5); dan
34. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2025 tentang RPJM Daerah Tahun 2025 – 2029.
35. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan Tahun 2025-2029 ini disusun dengan maksud memberikan penjabaran RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2025-2029 guna memberikan arah perencanaan dan pelaksanaan strategi program dan kegiatan yang berkesinambungan dalam 5 (lima) tahun ke depan, serta sebagai acuan resmi bagi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Sedangkan penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan Tahun 2025-2029 disusun dengan tujuan sebagai berikut :

1. Memberikan arah perencanaan dan pelaksanaan strategi program dan kegiatan yang berkesinambungan dalam 5 (lima) tahun kedepan pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

2. Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
3. Menyediakan acuan resmi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan dalam menentukan prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBD Kota Pekalongan;
4. Menyediakan satu tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
5. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan;

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) DINSOSP2KB Kota Pekalongan Tahun 2025 - 2029 disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan membahas latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. Subbab Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
memuat penjelasan tentang tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah, sumber daya Perangkat Daerah, kinerja pelayanan Perangkat Daerah serta kelompok sasaran pelayanan.
2. Subbab Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah paling sedikit memuat Permasalahan pelayanan Perangkat daerah dan isu strategis.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat penjelasan mengenai Tujuan Renstra PD Tahun 2025 – 2029, Sasaran Renstra PD tahun 2025 – 2029, Strategi PD dalam mencapai tujuan dan sasaran PD tahun 2025 – 2029, dan arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran PD tahun 2025 – 2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KEGIATAN PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.

Memuat uraian program, uraian kegiatan, uraian sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah, uraian sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran renstra PD tahun 2025 – 2029 melalui indikator Kinerja Utama (IKU) PD serta target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V PENUTUP

Memuat kesimpulan penting substantial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
(DINSOSP2KB) KOTA PEKALONGAN

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekalongan Nomor 26), yang menyebutkan bahwa DinsosP2KB adalah OPD tipe B yang mengurus urusan pemerintahan bidang sosial dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Diatur pula dalam Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 69 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyebutkan bahwa DinsosP2KB merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pemberdayaan sosial, bidang rehabilitasi perlindungan dan jaminan sosial, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. DinsosP2KB dipimpin Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

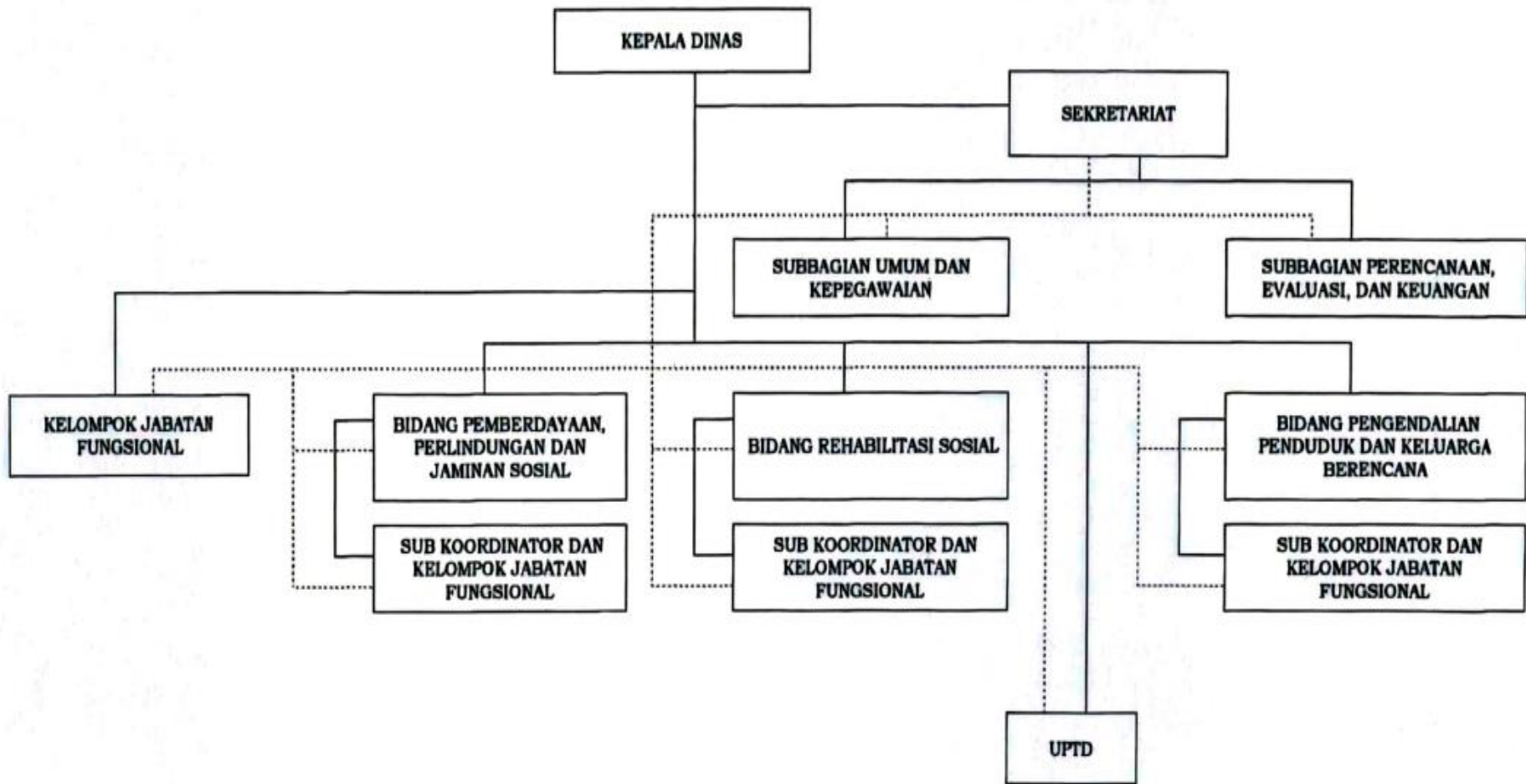
Struktur Organisasi DinsosP2KB

Adapun susunan Organisasi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2021 terdiri atas :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat
 - 1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan; dan
 - 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Pemberdayaan, Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial
- d. Bidang Rehabilitasi Sosial

- e. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- f. UPTD; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Susunan organisasi DinsosP2KB dapat digambarkan pada bagan sebagaimana berikut :



Sumber : Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Gambar 2. 1 Bagan Susunan Organisasi DINSOSP2KB Kota Pekalongan

Pada Struktur eselonering DinsoP2KB terdiri atas beberapa jenjang jabatan struktural. Kepala dinas dengan jabatan struktural Eselon II b berada langsung dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas dibantu Sekretaris yang memiliki Jabatan Struktural Eselon III a membawahi Kasubag Umum dan Kepegawaian serta Kasubag Perencanaan Evaluasi dan Keuangan masing masing memiliki jabatan struktural Eselon IV a. Sedangkan para Kabid pada DinsosP2KB memiliki Jabatan Struktural Eselon III b dan tidak membawahi jabatan struktural Eselon IV a dimana pelaksanaan kegiatan dibantu oleh pejabat fungsional sesuai bidang tugas masing masing.

Secara lebih rinci tugas pokok dan dan fungsi dari masing-masing tersebut diatas diatur dalam Peraturan Walikota Kota Pekalongan Nomor 69 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai berikut :

1) Kepala DINSOSP2KB,

Tugas pokok :

Membantu Walikota dalam melaksanakan penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Fungsi :

- a) Perumusan dan penetapan sasaran, program urusan sosial, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana;
- b) Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana;
- c) Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang kesekretariatan;
- d) Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial;
- e) Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

- f) Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang rehabilitasi sosial;
 - g) Pengarahan dan pengoordinasian pelaksanaan dan evaluasi Standart Operational Prosedur (SOP) dan atau Standart Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
 - h) Pengoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas; dan
 - i) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- 2) Sekretariat

2.a) Sekretaris

Tugas pokok :

Menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, pengorganisasian rencana program, kegiatan, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja serta administrasi keuangan.

Fungsi :

- a) Perumusan sasaran, program dan kegiatan dinas;
- b) Pengoordinasian penyusunan kebijakan dinas;
- c) Pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan bidang-bidang;
- d) Pengoordinasian penyusunan laporan dan evaluasi capaian kinerja, sasaran, program dan kegiatan;
- e) Pembinaan pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, ketatausahaan, kepegawaian, kehumasan, pengelolaan barang milik daerah, bahan Kerjasama, sarana prasarana teknologi informasi, perpustakaan dan kearsipan;
- f) Pengoordinasian pengelolaan, penatausahaan dan pelaporan bidang keuangan;
- g) Pengoordinasian pengelolaan data dan informasi;

- h) Pengoordinasian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - i) Pelaporan hasil pelaksanaan penerapan dan pencapaian Staandart pelayanan Minimal (SPM) urusan bidang sosial per semester;
 - j) Pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standart Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standart Pelayanan (SP);
 - k) Pengoordinasian pelaporan Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK), dan Evaluasi Jabatan (EVJAB);
 - l) Pengendalian, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
 - m) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang, tugas dan fungsinya.
- 2.b.) Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
- Tugas pokok Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Keuangan :
- a) Menyusun rencana kerja di bidang perencanaan, evaluasi dan keuangan;
 - b) Menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
 - c) Menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi evaluasi capaian program, kegiatan dan anggaran;
 - d) Menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi evaluasi capaian kinerja
 - e) Melaksanakan verifikasi pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan;
 - f) Melaksanakan fungsi akuntansi;
 - g) Menyusun bahan dan pengoordinasian laporan keuangan;
 - h) Menyusun bahan profil perangkat daerah;

- i) Mengelola dan dan informasi;
- j) Menyusun bahan tindak lanjut hasil pemeriksaan
- k) Menyusun laporan hasil penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan bidang sosial;
- l) Menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan
- m) Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.

2.c) Kasubag Umum dan Kepegawaian

Tugas Pokok Sub bagian Umum dan Kepegawaian :

- a) Menyusun rencana kerja di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
- b) Melaksanakan dan mengelola kegiatan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kehumasan, pengelolaan barang milik daerah, bahan Kerjasama, sarana prasarana teknologi informasi, perpustakaan dan kearsipan;
- c) Melaksanakan kegiatan tata Kelola barang milik daerah meliputi pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, penghapusan dan pelaporan barang milik daerah;
- d) Melaksanakan pengelolaan, pengembangan dan pembinaan kepegawaian;
- e) Menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- f) Mengelola dna menyusun laporan Analisa Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK) dan Evaluasi Jabatan (EVJAB); dan
- g) Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.

3) Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial

3.1) Kabid Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial

Tugas pokok :

Menyelenggarakan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan sosial.

Fungsi :

- a) Perumusan program kerja bidang pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial;
- b) Perumusan bahan kebijakan bidang pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial;
- c) Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial;
- d) Pengoordinasian pengumpulan sumbangan dalam daerah;
- e) Pengoordinasian pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah;
- f) Pemeliharaan taman makam pahlawan di daerah;
- g) Pengoordinasian pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah;
- h) Perencanaan dan pelaporan pelaksanaan dan pengevaluasian Standard Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standard Pelayanan 9SP) bidang tugasnya;
- i) Pengendalian, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- j) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

4) Bidang Rehabilitasi Sosial.

4.1) Kabid Rehabilitasi Sosial

Tugas pokok:

Menyelenggarakan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang rehabilitasi sosial.

Fungsi :

- a) Perumusan program kerja bidang rehabilitasi sosial;

- b) Perumusan bahan kebijakan bidang rehabilitasi sosial;
- c) Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang rehabilitasi sosial;
- d) Pengoordinasian pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah untuk dipulangkan ke desa/kelurahan asal;
- e) Penyelenggaraan rehabilitasi sosial dasar penyandang pengemis di luar panti sosial;
- f) Penyelenggaraan rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya, bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial;
- g) Penyelenggaraan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial;
- h) Penyelenggaraan pemberdayaan Masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana;
- i) Perencanaan dan pelaporan pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- j) Pengendalian, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- k) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

5) Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

5.1) Kabid Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tugas pokok :

Menyelenggarakan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana..

Fungsi :

- a) Perumusan program kerja bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

- b) Perumusan bahan kebijakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c) Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d) Penyelenggaraan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
- e) Penyelenggaraan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah;
- f) Penyelenggaraan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai kearifan budaya local;
- g) Pengoordinasian pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB);
- h) Penyelenggaraan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi, serta pelaksanaan pelayanan KB;
- i) Penyelenggaraan pemberdayaan dan peningkatan peran, serta organisasi kemasyarakatan Tingkat kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB;
- j) Penyelenggaraan Pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- k) Perencanaan dan pelaporan pelaksanaan dan evaluasi Standaer Operasional Prosedur (SOP) dan / atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- l) Pengendalian, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- m) Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan didukung dengan ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya perangkat daerah, baik dari aspek sumber daya manusia (SDM) maupun sarana dan prasarana yang dimiliki. Ketersediaan dan kualitas sumber daya ini menjadi salah satu faktor penentu dalam mendukung tercapainya visi, misi, serta tujuan strategis perangkat daerah.

Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan aset utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki ASN yang tersebar di berbagai bidang dan subbagian, dengan komposisi yang mencerminkan kebutuhan fungsional dan teknis. Adapun kualifikasi pendidikan dan kompetensi pegawai sebagian besar telah sesuai dengan kebutuhan organisasi, meskipun dalam beberapa bidang kekurangan pegawai dan masih diperlukan peningkatan kapasitas melalui pelatihan, bimtek, dan pengembangan kompetensi berkelanjutan.

Distribusi pegawai mencakup tenaga fungsional seperti Pekerja Sosial, Penyuluh Sosial, dan Pranata Komputer, serta tenaga administrasi yang mendukung proses manajerial dan operasional. Upaya peningkatan kinerja aparatur terus dilakukan melalui sistem evaluasi berbasis kinerja, penguatan budaya kerja, dan pengembangan karir sesuai peraturan perundang-undangan.

ASN pada DinsosP2KB Kota Pekalongan sampai dengan bulan Agustus 2025 sebanyak 20 orang yang diuraikan sesuai dengan tingkat pendidikan dan komposisi jabatan dalam struktur organisasi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2. 1 Jumlah dan Tingkat Pendidikan Pegawai DinsosP2KB Kota Pekalongan

NO	BIDANG	TINGKAT PENDIDIKAN						GENDER		TOTAL (ORANG)
		SD	SMP	SLTA	D3	S-1	S-2	L	P	
1	Sekretariat	1	0	1	2	5	2	7	4	11
2	Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial	0	0	0	0	2	1	2	0	3
3	Rehabilitasi Sosial	0	0	0	1	1	1	1	2	3
4	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0	0	1	0	1	1	0	3	3

Sumber : Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Agustus 2025

Tabel 2. 2 Komposisi Pegawai DinsosP2KB Kota Pekalongan

NO	BIDANG	GOLONGAN (ORANG)					TOTAL (ORANG)
		II	III	IV	PPPK	NON ASN	
1	Sekretariat	4	4	2	1	8	19
2	Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial	0	2	1	0	19	22
3	Rehabilitasi Sosial	1	2	0	0	32	35
4	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0	2	1	0	15	18

Sumber : Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Agustus 2025

Aset/Modal Kerja

Untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan memiliki aset yang merupakan faktor penting dalam penyelenggaraan administrasi Pemerintahan. Adapun aset pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan per Semester I Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 3 Prasarana dan Sarana DINSOSP2KB Kota Pekalongan

NO	SARPRAS	JUMLAH	SATUAN
1	Tanah	11	Bidang
2	Alat Besar	1	Unit
3	Alat Angkutan	68	Unit
4	Alat Bengkel dan Alat Ukur	1	Unit
5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	618	Unit
6	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	126	Unit
7	Alat Kedokteran dan Kesehatan	102	Unit
8	Alat Laboratorium	200	Unit
9	Komputer	222	Unit
10	Bangunan Gedung	27	Unit
11	Monumen	2	Unit
12	Jalan dan Jembatan	2	Unit
13	Bangunan Air	1	Unit
14	Jaringan	9	Unit
15	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1	Unit
16	Aset Tidak Berwujud	4	Unit
17	Aset Lain-lain (RB)	120	Unit

Sumber : *DinsosP2KB Kota Pekalongan, Rekon Aset Semester I Tahun 2025*

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian Kinerja Dinas Sosial , Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya, menurut SPM sosial, dan/atau indikator kinerja pelayanan perangkat daerah dan indikator kinerja kunci (IKK) yang ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2. 4 Pencapaian Kinerja DinsosP2KB Kota Pekalongan

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target IKU	Satuan	Target Renstra DinsosP2KB Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
1	Nilai SAKIP OPD		√			70,00	70,00	71,50	73,00	74,65	68,46	71,53	71,75	74,40	75,90	97,80	102,19	100,35	101,92	101,67
2	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja				persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,01	100,00	100,00	100,00	100,00	100,01
3	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah				persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	65,71	100,00	100,13	100,00	100,00	65,71	100,00	100,13
4	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah				persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)			√	persen	6,95	6,95	3,32	3,43	4,00	8,56	11,69	18,39	17,64	16,68	123,17	168,20	553,92	514,29	417,00
6	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan				persen	66,67	75,00	50,00	58,00	67,00	75,00	75,00	42,86	65,41	100,00	112,49	100,00	85,72	112,78	149,25
7	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM/IKK outcome)	√			persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	25,16	100,00	126,14	100,00	100,00	25,16	100,00	126,14
8	Persentase keluarga miskin yang memperoleh perlindungan dan layanan Jaminan Sosial				persen	30,22	37,02	58,46	56,69	55,12	46,72	58,41	67,91	57,38	27,64	154,60	157,78	116,16	101,22	50,15

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target IKU	Satuan	Target Renstra DinsosP2KB Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
9	Persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (SPM)	√			persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan				persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	Persentase pencapaian pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)			√	persen	64,00	66,00	67,45	67,50	67,55	69,02	68,37	64,27	61,46	64,41	107,84	103,59	95,29	91,05	95,35
12	Persentase rumah tangga yang dilakukan pendataan/updating data keluarga				persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99,68	70,28	82,60	100,00	100,00	99,68	70,28	82,60
13	Penurunan Angka Perkawinan di bawah 21 Tahun				persen	88,89	55,55	8,00	7,80	12,00	101,11	13,11	5,37	14,44	11,28	87,91	423,72	148,98	54,02	106,38
14	Unmeet need KB				perseribu	-	-	16,00	15,00	14,00	-	-	13,08	14,95	8,48	-	-	122,32	100,33	165,09

Sumber : Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Agustus 2025

Dalam urusan sosial, Kementerian Sosial berperan dalam merumuskan kebijakan, menyediakan anggaran, dan memastikan adanya standar nasional untuk kesejahteraan sosial. Berkaitan hal tersebut kementerian sosial mengamanatkan Indeks Kesejahteraan Sosial (Ikesos) menjadi salah satu indikator daerah pada RPJMD RENSTRA PD 2025 – 2029. Ikesos menjadi indikator yang mendukung indikator renstra kementerian Sosial. Ikesos digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan sosial suatu wilayah atau kelompok masyarakat, dengan mempertimbangkan aspek kesejahteraan sosial objektif dan subyektif untuk memberikan gambaran komprehensif tentang kualitas hidup masyarakat. Di sisi lain, berfungsi juga sebagai panduan dalam merumuskan arah kebijakan.

Ikesos diperoleh dari 3 dimensi yaitu dimensi kebutuhan dasar , dimensi peranan sosial dan dimensi keberdayaan ekonomi. Dimensi kebutuhan dasar terdiri dari 7 variabel dan 18 indikator. Dimensi Peranan Sosial terdiri dari 3 variabel dan 11 indikator. Sedangkan Dimensi keberdayaan ekonomi terdiri dari 3 variabel dan 9 indikator. Dari beberapa variabel tersebut, 60 persen diambilkan dari data sekunder Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang diolah ke dalam indeks kesejahteraan sosial dengan sumber data bisa dipertanggungjawabkan dari Badan Pusat Statistik.

Dalam urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Indeks Lansia berdaya menjadi salah satu indikator daerah pada RPJMD 2025 – 2029. Indeks Lansia Berdaya menjadi salah satu indikator Peta Jalan Pembangunan Kependudukan dalam sistem Perencanaan Daerah.

Indeks Lansia Berdaya adalah indeks komposit yang menggambarkan tentang lansia yang memenuhi indikator dari dimensi lansia tangguh yaitu dimensi spiritual, dimensi fisik, dimensi emosional, dimensi sosial kemasyarakatan, dimensi intelektual, dimensi vokasional dan dimensi lingkungan. Indeks Lansia Berdaya menunjukkan tingkat ketangguhan/ keberdayaan lansia, dimana semakin tinggi angkanya menunjukkan semakin tangguh/ berdaya lansia tersebut.

Dalam urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdapat Pelayanan KB Pasca Persalinan (KB PP), merupakan salah satu intervensi strategis yang berpengaruh langsung terhadap kualitas pembangunan sosial dan efektivitas pengendalian penduduk. KB PP memastikan bahwa setiap ibu yang baru melahirkan memperoleh akses kontrasepsi modern secara cepat dan aman, sehingga dapat mencegah kehamilan yang tidak direncanakan serta mengatur jarak kelahiran secara ideal.

KB Pasca Persalinan berperan dalam memperkuat ketahanan keluarga melalui pengurangan risiko kesehatan ibu dan anak yang sering menjadi pemicu timbulnya masalah sosial di masyarakat. Jarak kelahiran yang lebih panjang memungkinkan keluarga mengoptimalkan pemenuhan kebutuhan dasar anak, mengelola ekonomi rumah tangga dengan lebih stabil, serta meminimalkan kerentanan sosial seperti keterlantaran, kemiskinan, dan rendahnya kualitas pengasuhan.

KB Pasca Persalinan berkontribusi signifikan dalam menekan *Total Fertility Rate* (TFR), mengurangi *unmet need*, serta memperbaiki struktur pertumbuhan penduduk melalui pengaturan jarak dan jumlah kelahiran. Momentum pasca persalinan merupakan *window of opportunity* yang efektif karena tingkat kesiapan pasangan untuk merencanakan kehamilan berikutnya relatif tinggi. Peningkatan cakupan KB PP secara langsung mendukung efisiensi pencapaian sasaran pembangunan kependudukan dan indikator kinerja KB di tingkat daerah.

Secara keseluruhan, penerapan KB Pasca Persalinan menjadi bagian integral dari upaya peningkatan kualitas hidup keluarga dan penguatan ketahanan sosial masyarakat. Integrasi layanan ini dalam sistem kesehatan dan pelayanan sosial dasar memberikan kontribusi jangka panjang terhadap stabilitas sosial, efektivitas pengendalian penduduk, serta keberhasilan pembangunan keluarga yang sejahtera dan berkelanjutan.

2.1.4. Kinerja Keuangan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2020 – 2024

Dari sisi kinerja keuangan selama kurun waktu tahun 2020 -2024 yang dicapai Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan dapat ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2. 5 Pencapaian Realisasi Keuangan DinsosP2KB Kota Pekalongan

No.	Indikator Kinerja Keuangan Daerah	Anggaran Pada Tahun ke- (Jutaan)					Realisasi Anggaran Tahun ke- (Jutaan)					Ratio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)					Angka Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	Belanja Langsung	6.857,6 930	9.911,3 220	12.969, 1850	12.929, 7700	11.876, 1950	6.226,0 80275	8.261,7 67797	11.623, 207870	12.143, 050113	11.052, 180180	90,79	83,36	89,62	93,92	93,06	16,73	17,22
2	Belanja Pegawai	2.649,4 410	2.835,7 560	2.802,9 440	2.524,8 350	2.641,1 110	2.160,8 25071	2.541,6 85305	2.570,9 46953	2.345,0 30937	2.309,8 72162	81,56	89,63	91,72	92,88	87,46	0,14	2,12
3	Belanja Barang/Jasa	5.384,6 930	6.134,1 660	8.304,3 670	8.597,4 300	8.313,6 650	4.812,4 39350	4.834,1 01392	7.491,5 60637	5.054,9 81576	7.874,4 38518	89,37	78,81	90,21	58,80	94,72	12,38	19,67
4	Belanja Modal	1.265,4 900	518,36 70	189,78 80	2.124,3 310	584,72 10	1.226,6 80925	487,74 0600	185,89 5000	2.113,5 70500	577,04 3630	96,93	94,09	97,95	99,49	98,69	206,10	210,54

Sumber : Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Agustus 2025

Penerapan SPM Sosial Pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan

SPM menetapkan jenis dan mutu pelayanan dasar yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah untuk menjamin akses masyarakat terhadap layanan sosial yang berkualitas. SPM berfungsi sebagai tolok ukur kinerja bagi DinsosP2KB dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Dengan menerapkan SPM, dapat meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi dalam pelayanan, sehingga mendorong perbaikan kinerja secara keseluruhan. Penerapan SPM juga mempengaruhi alokasi anggaran daerah, karena SPM dapat dijadikan dasar dalam perencanaan dan penganggaran yang lebih terukur. Hal ini memastikan bahwa sumber daya dialokasikan secara efektif untuk mencapai standar pelayanan yang ditetapkan, yang pada gilirannya meningkatkan kinerja OPD. Capaian SPM tahun 2024 DinsosP2KB disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2. 6 Capaian SPM DinsosP2KB Tahun 2024

NO	JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Capaian 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Jumlah Yang Harus Dilayani	orang	207
		Layanan data dan pengaduan	orang	115
		Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	orang	90
		Penyediaan permakanan	orang	207
		Penyediaan sandang	orang	207
		Penyediaan alat bantu	orang	6
		Penyediaan perbekalan kesehatan	orang	207
		Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	orang	207
		Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	orang	95
		Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	orang	99
		Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	orang	207
		Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	orang	207

		Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	orang	95
		Layanan rujukan	orang	4
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di di Luar Panti	Jumlah Yang Harus Dilayani	Orang	26
		Layanan data dan pengaduan	Orang	1
		Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	25
		Penyediaan permakanan	Orang	26
		Penyediaan sandang	Orang	26
		Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	26
		Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	26
		Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	Orang	26
		Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	4
		Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	26
		Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	26
		Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	26
		Layanan rujukan	Orang	0
		3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	Jumlah Yang Harus Dilayani
Layanan data dan pengaduan	Orang			22
Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang			16
Penyediaan permakanan	Orang			39
Penyediaan sandang	Orang			39
Penyediaan alat bantu	Orang			12
Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang			39
Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang			39
Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar	Orang			8
Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang			13
Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang			39
Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang			39
Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang			8
Layanan rujukan	Orang			11

4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	Jumlah Yang Harus Dilayani	Orang	32
		Layanan data dan pengaduan	Orang	11
		Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	21
		Penyediaan permakanan	Orang	32
		Penyediaan sandang	Orang	32
		Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	32
		Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	32
		Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	Orang	29
		Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	10
		Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	32
		Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	32
		Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	29
		Layanan rujukan	Orang	0
		5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Yang Harus Dilayani
Penyediaan permakanan	Orang			2120
Penyediaan sandang	Orang			2120
Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Orang			3
Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang			1070
Pelayanan dukungan Psikososial	Orang			2120

Sumber : Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Agustus 2025

2.1.1 Kelompok Sasaran Layanan

Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana sebagaimana menurut urusan yang diampu, terdiri dari urusan sosial dan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Urusan sosial pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan memiliki fokus utama pada pemenuhan hak dasar dan perlindungan terhadap kelompok rentan serta peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat. Berdasarkan undang undang no 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, kelompok sasaran utama dari layanan ini mencakup :

1. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

PPKS atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, adalah individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang mengalami hambatan, kesulitan, atau gangguan dalam melaksanakan fungsi sosialnya sehingga membutuhkan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup secara layak. Termasuk di dalamnya:

- Anak terlantar
- Lanjut usia terlantar
- Penyandang disabilitas terlantar
- Gelandangan dan pengemis
- Korban tindak kekerasan dan perdagangan orang
- Korban bencana alam dan bencana sosial
- Fakir miskin dan keluarga rentan miskin

2. Penerima Bantuan Sosial

Sasaran ini mencakup keluarga dan individu miskin dan rentan yang terdaftar dalam Data Kesejahteraan Sosial dan/atau hasil verifikasi lapangan. Mereka menerima berbagai program seperti:

- Bantuan pangan
- Bantuan rehabilitasi sosial
- Bantuan sosial tunai/non-tunai
- Program perlindungan dan jaminan sosial lainnya

3. Kelompok Rentan dan Marginal

Yaitu individu atau komunitas yang berada dalam situasi sosial ekonomi yang terpinggirkan, seperti:

- Komunitas adat terpencil
- Masyarakat urban miskin
- Keluarga yang terdampak konflik sosial
- Pekerja sektor informal yang tidak terlindungi

4. Pekerja Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Pekerja sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial. Mereka adalah mitra strategis pemerintah daerah dalam pelaksanaan program pelayanan, pendampingan, dan

pemberdayaan sosial kepada kelompok rentan dan masyarakat miskin, termasuk kedalamnya adalah :

- Pekerja Sosial
- TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan)
- Pendamping sosial program Bansos
- Karang taruna
- Lembaga kesejahteraan sosial (LKS)
- Tagana (Taruna Siaga Bencana)
- Relawan sosial yang berperan sebagai mitra pemerintah dalam pemberdayaan dan pelayanan sosial.

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada DinsosP2KB memiliki mandat untuk menyelenggarakan pelayanan kependudukan yang berkelanjutan serta membina ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Untuk itu, program dan kegiatannya menasar berbagai kelompok strategis di masyarakat yang memiliki peran kunci dalam keberhasilan pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga. Kelompok sasaran pelayanan meliputi :

1. PUS (Pasangan Usia subur)
2. Remaja dan Calon Pengantin
3. Keluarga dengan anak
4. Ibu hamil, menyusui dan balita
5. Lansia dan keluarga lansia
6. Tokoh masyarakat dan kader

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Permasalahan Pelayanan DinsosP2KB

Setelah melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja pembangunan pada urusan sosial dan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, masih ditemukan permasalahan yang tersaji sebagai berikut :

Tabel 2. 7 Pemetaan Permasalahan

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Masih rendahnya kesejahteraan sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Belum optimalnya keberfungsian sosial bagi penduduk miskin dan rentan	Belum memadainya pelayanan sosial bagi PPKS (Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis) d luar panti
		Belum optimalnya Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Belum Optimalnya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah
		belum optimalnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan	Belum optimalnya Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
		Belum optimalnya perlindungan dan jaminan sosial bagi korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan dasar Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
2.	Masih rendahnya kualitas keluarga	Belum optimalnya data kependudukan yang tersedia dalam pengambilan kebijakan	Belum optimalnya ketersediaan dokumen kependudukan per keluarga
		Masih tingginya unmeedneed KB	Masih tingginya angka kelahiran pada usia Remaja
		Masih rendahnya pemakaian kontrasepsi modern	Belum optimalnya kepesertaan KB MKJP berdasarkan pemutakhiran basis data keluarga Indonesia
			Belum optimalnya Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
3.	Belum optimalnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam mendukung peningkatan kualitas layanan publik	Belum optimalnya ketersediaan laporan capaian kinerja dan layanan administrasi penunjang urusan sosial dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana	1. Belum optimalnya dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang disusun 2. Belum optimalnya kualitas layanan publik urusan sosial dan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana

Sumber : Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Agustus 2025

Faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi permasalahan yang ada pada DinsosP2KB antara lain :

a) Faktor Eksternal

- 1) Kemiskinan yang tinggi menyebabkan meningkatnya jumlah PPKS
- 2) Keterbatasan lapangan kerja dan penghasilan tidak tetap menimbulkan kerentanan sosial dan menunda akses pelayanan KB atau pendidikan reproduksi
- 3) Norma atau nilai sosial yang mulai luntur serta meningkatnya individualisme
- 4) Kepercayaan/adat yang menolak penggunaan alat kontrasepsi
- 5) Disfungsi keluarga (perceraian, kekerasan, pengasuhan tidak memadai) dapat menimbulkan anak terlantar atau lansia terlantar
- 6) Rendahnya pemahaman masyarakat tentang manfaat KB dan kesehatan reproduksi
- 7) Rendahnya pendidikan masyarakat menyebabkan minimnya kesadaran terhadap hak dan kewajiban sosial serta kurangnya kemampuan meningkatkan kesejahteraan
- 8) Kondisi rawan bencana dapat memicu masalah sosial seperti anak jalanan, gelandangan dan kemiskinan perkotaan

b) Faktor Internal

- 1) Keterbatasan tenaga profesional yang memiliki keahlian khusus untuk menangani permasalahan sosial
- 2) Keterbatasan daya tampung tempat rehabilitasi sosial/rumah singgah
- 3) Kurangnya penegakan peraturan daerah urusan sosial dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- 4) Keterbatasan anggaran penanganan urusan sosial dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana

2.2.2. Isu Strategis

Tabel 2. 8 Isu Strategis DinsosP2KB

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Peran serta masyarakat, PSKS dan LKS dalam meningkatkan kesejahteraan PPKS	masih rendahnya kesejahteraan PPKS	Belum meratanya akses pemenuhan kualitas hidup sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat	Mengakhir segala bentuk kemiskinan dimanapun	Penciptaan Lapangan Kerja Berkualitas dan Pengembangan Kewirausahaan	Kesejahteraan Masyarakat	Penguatan data kesejahteraan sosial yang akurat dan terverifikasi untuk mendukung penyediaan basis data intervensi penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.
Data dan sistim informasi keluarga yang mendukung program dan kebijakan peningkatan kualitas keluarga	masih rendahnya kualitas keluarga	Belum meratanya akses pemenuhan kualitas hidup sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat	Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan	Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kesetaraan Gender	Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia;	Peningkatan kemandirian, ketentraman dan kebahagiaan keluarga mendukung perwujudan keluarga berkualitas

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Dukungan Pemerintah dalam perlindungan sosial adaptif, terintegrasi dan inklusif untuk semua masyarakat	Belum optimalnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam mendukung peningkatan kualitas layanan publik	Perlunya meningkatkan reformasi birokrasi dalam keamanan, pelayanan publik dan kapasitas keuangan daerah	Mengakhir segala bentuk kemiskinan dimanapun	Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kesetaraan Gender	Penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	Peningkatan kualitas dan mutu penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai tolak ukur dalam pemenuhan pelayanan dasar bagi PPKS.

Sumber : Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Agustus 2025

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra DinsosP2KB Tahun 2025 - 2029

Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai penyelenggara urusan sosial dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana pada renstra 2025 – 2029 merumuskan tujuan yaitu **“Menurunkan Populasi PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) dan Mewujudkan Keluarga Berkualitas dalam Rangka Peningkatan Kualitas Layanan Publik”**, dengan indikator terdiri dari :

1. Persentase populasi PPKS (pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial)
2. Indeks Pembangunan Keluarga (ibangga)
3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

3.2 Sasaran Renstra DinsosP2KB Tahun 2025 – 2029

Dalam mewujudkan tujuan Renstra DinsosP2KB Tahun 2025 – 2029 dirumuskan sasaran renstra sebagai berikut :

1. Terpenuhinya kebutuhan dasar PPKS
2. Menurunnya populasi PPKS fakir miskin
3. Terkendalinya angka kelahiran
4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Keterkaitan sasaran RPJMD Kota Pekalongan 2025 – 2029 dengan tujuan dan sasaran Renstra DinsosP2KB tahun 2025 – 2029 ditunjukkan dalam tabel tujuan dan sasaran Renstra DinsosP2KB 2025 – 2029 dibawah ini :

Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Renstra DinsosP2KB 2025 – 2029

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE		TARGET TAHUN					KET.
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Sasaran 4.1 Menurunnya Populasi PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)	Menurunkan PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) dan mewujudkan keluarga berkualitas dalam rangka peningkatan kualitas layanan publik		Indikator Tujuan : Persentase populasi PPKS (pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial)	7,52	7,50	7,38	7,27	7,16	7,04	6,92	
		Terpenuhinya kebutuhan dasar PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)	Indikator Sasaran : Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100	100	100	100	100	100	100	
		Menurunnya populasi PPKS fakir miskin	Indikator Sasaran : Jumlah Keluarga Miskin Penerima Perlindungan Sosial yang tergraduasi dari kemiskinan	240	230	230	230	230	230	230	
			Indikator Tujuan : Indeks Pembangunan Keluarga /ibangga (IUP)	65,92	65,91 - 65,92	66,68 - 66,71	67,46 - 67,49	68,23 - 68,28	69,00 - 69,06	69,77 - 69,85	
		Terkendalinya Angka Kelahiran	Indikator Sasaran : Total	2,19	2,18	2,18	2,17	2,17	2,16	2,16	

		Fertility Rate (IKK)								
		Indikator Tujuan : Indeks kepuasan masyarakat (IKM) OPD	92,78	92,88	92,98	93,08	93,18	93,28	93,38	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Indikator Sasaran : Nilai SAKIP OPD	75,90	75,92	75,94	75,96	75,98	76,00	76,02	

Sumber : Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Agustus 2025

3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran renstra DinsosP2KB Tahun 2025 – 2029

Strategi yang dilakukan DinsosP2KB dalam mencapai tujuan dan sasaran renstra DinsosP2KB Tahun 2025 – 2029 sebagaimana dijelaskan dalam tabel Strategi Renstra Perangkat Daerah dibawah ini :

Tabel 3. 2 Strategi Renstra DinsosP2KB 2025 - 2029

	Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tema Pembangunan RPJMD	Transformasi sosial yang produktif, berkarakter dan berbudaya melalui penguatan kualitas dan manajemen SDM sebagai sumber daya pembangunan yang berkelanjutan	Transformasi tata kelola pemerintahan digital yang akuntabel, transparan, berintegritas, tangkas dan kolaboratif serta penguatan kondusivitas wilayah disertai dengan sistem peningkatan kesejahteraan dan keselamatan masyarakat	Transformasi ekonomi menuju ekonomi sirkular yang didukung dengan peningkatan lingkungan hidup serta tata kelola investasi	Penguatan Pembangunan Infrastruktur dasar permukiman dan perkotaan yang berkualitas	Optimalisasi pembangunan pondasi Mina Batik”
Strategi Tahunan RPJMD	Penguatan SDM dan kapasitas masyarakat untuk mendorong	Penguatan tata kelola untuk memperluas jaminan perlindungan	Peningkatan akses PPKS, calon tenaga kerja dan perempuan terhadap	Kolaborasi stakeholder dalam penyediaan infrastruktur yang	Optimalisasi perlindungan sosial yang adaptif bagi masyarakat rentan,

	Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	percepatan penanggulangan kemiskinan, penurunan angka pengangguran, serta peningkatan kesetaraan gender	sosial bagi masyarakat rentan, perlindungan termasuk Perempuan dan anak serta peningkatan pemberdayaan LPKS dan BLKK dalam peningkatan kompetensi calon tenaga kerja	sumber daya ekonomi sirkular, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha	mendukung penanggulangan kemiskinan, penurunan pengangguran dan pemenuhan layanan berperspektif gender yang inklusif	penurunan angka pengangguran terbuka, serta pemenuhan layanan berperspektif gender yang inklusif
Strategi Renstra OPD	Sinkronisasi data kesejahteraan sosial untuk mewujudkan data tunggal yang reliabel dan mudah diakses serta penguatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat untuk mendorong perwujudan kemandirian.	Penguatan kelembagaan, tata kelola serta kebijakan penanggulangan kemiskinan daerah	Peningkatan akses berusaha bagi PPKS	Kolaborasi stakeholder dalam penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Optimalisasi perlindungan sosial yang adaptif bagi masyarakat rentan

Sumber : Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Agustus 2025

3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran renstra DinsosP2KB Tahun 2025 – 2029

DinsosP2KB menyusun arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran renstra Dinsos2KB Tahun 2025 – 2029 yang disusun dalam tabel arah kebijakan Renstra DinsosP2KB sebagai beriku :

Tabel 3. 3 Arah Kebijakan Renstra DinsosP2KB 2025 - 2029

NO.	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Optimalisasi upaya penanggulangan kemiskinan melalui perlindungan sosial yang adaptif bagi masyarakat rentan, optimalisasi upaya menurunkan angka pengangguran terbuka, serta peningkatan pemenuhan layanan berperspektif gender yang inklusif	Penguatan SDM dan kapasitas masyarakat untuk mendorong percepatan penanggulangan kemiskinan, penurunan angka pengangguran, serta peningkatan kesetaraan gender	
		Penguatan tata kelola untuk memperluas jaminan perlindungan sosial bagi masyarakat rentan, perlindungan termasuk Perempuan dan anak serta peningkatan pemberdayaan LPKS dan BLKK dalam peningkatan kompetensi calon tenaga kerja	
		Peningkatan akses PPKS, calon tenaga kerja dan perempuan terhadap sumber daya ekonomi sirkular, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha	
		Kolaborasi stakeholder dalam penyediaan infrastruktur yang mendukung penanggulangan kemiskinan, penurunan pengangguran dan pemenuhan	

NO.	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)
		layanan berperspektif gender yang inklusif	
		Optimalisasi perlindungan sosial yang adaptif bagi masyarakat rentan, penurunan angka pengangguran terbuka, serta pemenuhan layanan berperspektif gender yang inklusif	

Sumber : Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Agustus 2025

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mengampu 9 Program sebagai berikut :

1. Program Rehabilitasi Sosial

Program Rehabilitasi Sosial dilaksanakan untuk mendukung target capaian indikator renstra yaitu Persentase PPKS penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM)

2. Program Penanganan Bencana

Program Penanganan Bencana dilaksanakan untuk mendukung target capaian indikator renstra yaitu Persentase perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana kabupaten/kota (SPM)

3. Program Pemberdayaan Sosial

Program Pemberdayaan Sosial dilaksanakan untuk mendukung target capaian indikator renstra yaitu Persentase lembaga potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang diberdayakan.

4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dilaksanakan untuk mendukung target capaian indikator renstra yaitu Persentase keluarga miskin berhak mendapat intervensi sosial yang mendapat intervensi sosial

5. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Program pengelolaan Taman Makam Pahlawan dilaksanakan untuk mendukung target capaian indikator renstra yaitu Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan

6. Program Pengendalian Penduduk

Program Pengendalian Penduduk dilaksanakan untuk mendukung target capaian indikator renstra yaitu Persentase pemakaian kontrasepsi modern (*Modern Contraceptive Prevalance Rate/ mCPR*) (IKK)

7. Program Pembinaan Keluarga Berencana
Program Pembinaan Keluarga Berencana dilaksanakan untuk mendukung target capaian indikator renstra yaitu Persentase kebutuhan ber – KB yang tidak terpenuhi (*unmetneed* KB) (IKK)
8. Program Pembinaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
Program Pembinaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) dilaksanakan untuk mendukung target capaian indikator renstra yaitu Persentase Angka kelahira pada Remaja umur 15 – 19 tahun (*Age Specific Fertility Rate*/ASFR 15 – 19)
9. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Program ini dilaksanakan untuk mendukung target capaian indikator renstra yaitu (1) Persentase keselarasan perencanaan, kinerja evaluasi dan kinerja keuangan perangkat daerah (2) Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (3) Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah.

4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

Renstra DinsosP2KB Tahun 2025 – 2029 mengampu 9 Program yang terdiri dari 17 Kegiatan dan 57 Sub kegiatan dengan perincian rencana penganggaran untuk masing masing sub kegiatan, kegiatan serta program diuraikankan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4. 1 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

NAMA BIDANG URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
				Th. 2024	Th. 2025	Th. 2026		Th. 2027		Th. 2028		Th. 2029		Th. 2030		
						Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	5	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)
TOTAL							9.779.380. 000		10.927.36 1.000		11.456.55 7.000		11.952.237. 000		12.528.524.0 00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							3.570.572. 000		4.173.109 .000		4.474.049 .000		4.739.209.0 00		5.075.667.00 0	
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Terwujudnya lembaga Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan	Indikator Program : Persentase lembaga potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang diberdayakan	persen	NA	74,67	74,67	186.900.0 00	80	354.086.0 00	85,33	379.020.0 00	90,67	406.098.00 0	94,67	435.468.000	
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya kelembagaan kesejahteraan sosial yang aktif	Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang aktif	persen	90	90	91	186.900.0 00	92	354.086.0 00	93	379.020.0 00	94	406.098.00 0	95	435.468.000	
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	1	1	7	30.000.00 0	7	176.550.0 00	7	188.908.0 00	7	202.150.00 0	7	216.300.000	

NAMA BIDANG URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
				Th. 2024	Th. 2025	Th. 2026		Th. 2027		Th. 2028		Th. 2029		Th. 2030		
						Targ et	Pagu	Tar get	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	5	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)
Fasilitasi Pemberian Penghargaan dan Santunan Sosial bagi Warakawuri/ Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan		Jumlah Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial	Orang	35	15	19	22.500.000	19	42.750.000	19	42.750.000	19	42.750.000	19	42.750.000	
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	0	0	40	134.400.000	40	134.786.000	40	147.362.000	40	161.198.000	40	176.418.000	

NAMA BIDANG URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
				Th. 2024	Th. 2025	Th. 2026		Th. 2027		Th. 2028		Th. 2029		Th. 2030		
						Targ et	Pagu	Tar get	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	5	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Terwujudnya pemenuhan kebutuhan dasar PPKS di luar panti	Indikator Program :Persentase PPKS penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM)	persen	100	100	100	1.696.992.000	100	1.728.391.000	100	1.886.418.000	100	1.959.118.000	100	2.048.049.000	
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Tercapainya PPKS (Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis) diluar panti yang mendapat pelayanan sosial	Indikator Kegiatan : Persentase PPKS (Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis) yang mendapat pelayanan sosial	persen	100	100	100	1.187.612.000	100	1.219.011.000	100	1.365.638.000	100	1.438.338.000	100	1.514.269.000	

NAMA BIDANG URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
				Th. 2024	Th. 2025	Th. 2026		Th. 2027		Th. 2028		Th. 2029		Th. 2030		
						Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	5	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)
Penyediaan Permakanan		Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	80	65	60	458.472.0 00	60	459.871.0 00	60	568.471.0 00	60	628.471.00 0	60	674.402.000	
Penyediaan Sandang		Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	0	0	60	11.215.00 0	60	11.215.00 0	60	11.215.00 0	60	11.215.000	60	21.215.000	
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Orang	80	65	60	657.325.0 00	60	657.325.0 00	60	680.352.0 00	60	693.052.00 0	60	713.052.000	

NAMA BIDANG URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
				Th. 2024	Th. 2025	Th. 2026		Th. 2027		Th. 2028		Th. 2029		Th. 2030		
						Targ et	Pagu	Tar get	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	5	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)
		Kewenangan Kabupaten/Kota														
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat		Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0	0	15	10.000.00 0	30	20.000.00 0	30	20.000.000	30	20.000.000	
Pemberian Layanan Rujukan		Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0	0	20	20.000.00 0	25	25.000.00 0	25	25.000.000	25	25.000.000	

NAMA BIDANG URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
				Th. 2024	Th. 2025	Th. 2026		Th. 2027		Th. 2028		Th. 2029		Th. 2030		
						Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	5	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)
Penyediaan Perbekalan Kesehatan		Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan	Orang	0	0	60	60.600.00 0	60	60.600.00 0	60	60.600.00 0	60	60.600.000	60	60.600.000	
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Tercapainya PPKS lainnya yang mendapat pelayanan sosial di luar panti sosial	Indikator Kegiatan : Persentase PPKS lainnya yang mendapat pelayanan sosial di luar panti sosial	persen	8.80	3.82	100	509.380.0 00	100	509.380.0 00	100	520.780.0 00	100	520.780.00 0	100	533.780.000	
Penyediaan Permakanan		Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kot a	Orang	907	903	757	358.800.0 00	757	358.800.0 00	757	358.800.0 00	757	358.800.00 0	757	358.800.000	

NAMA BIDANG URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
				Th. 2024	Th. 2025	Th. 2026		Th. 2027		Th. 2028		Th. 2029		Th. 2030		
						Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	5	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)
Penyediaan Alat Bantu		Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	18	10	10	26.700.00 0	10	25.700.00 0	10	26.000.00 0	10	26.000.000	10	36.000.000	
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA		Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	0	0	50	11.800.00 0	50	11.800.00 0	50	11.800.00 0	50	11.800.000	50	11.800.000	
Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak		Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau	Orang	10	10	20	52.000.00 0	20	52.000.00 0	20	62.000.00 0	20	62.000.000	20	62.000.000	

NAMA BIDANG URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
				Th. 2024	Th. 2025	Th. 2026		Th. 2027		Th. 2028		Th. 2029		Th. 2030		
						Targ et	Pagu	Tar get	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	5	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)
		Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota														
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	127	83	100	50.180.000	100	50.180.000	100	50.180.000	100	50.180.000	100	50.180.000	
Pengembangan dan Kampanye Sosial Peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya		Indikator Sub Kegiatan : Jumlah peserta yang mengikuti pengembangan dan kampanye sosial peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan	Orang	0	0	100	10.900.000	100	10.900.000	100	12.000.000	100	12.000.000	100	15.000.000	

NAMA BIDANG URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
				Th. 2024	Th. 2025	Th. 2026		Th. 2027		Th. 2028		Th. 2029		Th. 2030		
						Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	5	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)
		Sosial (PPKS) Lainnya														
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Terwujudnya keluarga miskin berhak mendapat intervensi sosial yang mendapat intervensi sosial	Indikator Program :Persentase keluarga miskin berhak mendapat mendapat intervensi sosial yang mendapat intervensi sosial	persen	35,2	51,83	51,83	1.318.780. 000	51,8 3	1.457.624 .000	51,83	1.508.080 .000	51,83	1.604.529.0 00	51,83	1.752.214.00 0	
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya data fakir miskin yang terverifikasi dan validasi	Indikator Kegiatan : Persentase usulan data fakir miskin yang terverifikasi dan validasi	persen		100	100	1.318.780. 000	100	1.457.624 .000	100	1.508.080 .000	100	1.604.529.0 00	100	1.752.214.00 0	
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kot a yang Didata	Orang	2287	6000	2287	331.080.0 00	2287	469.924.0 00	2287	469.924.0 00	2287	469.924.00 0	2287	469.924.000	

NAMA BIDANG URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
				Th. 2024	Th. 2025	Th. 2026		Th. 2027		Th. 2028		Th. 2029		Th. 2030		
						Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	5	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat		Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	0	0	10	242.700.000	10	242.700.000	10	293.156.000	15	389.605.000	20	537.290.000	
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	950	950	500	745.000.000	500	745.000.000	500	745.000.000	500	745.000.000	500	745.000.000	
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Terwujudnya perlindungan dan jaminan sosial bagi korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat	Indikator Program :Persentase perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana	persen	100	100	100	310.540.000	100	379.620.000	100	429.620.000	100	479.620.000	100	529.620.000	

NAMA BIDANG URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
				Th. 2024	Th. 2025	Th. 2026		Th. 2027		Th. 2028		Th. 2029		Th. 2030		
						Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	5	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)
		kabupaten/kota (SPM)														
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Tercapainya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	Indikator Kegiatan : Persentase Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	persen	102.33	100	100	310.540.000	100	379.620.000	100	429.620.000	100	479.620.000	100	529.620.000	
Penyediaan Makanan		Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	2120	500	500	300.540.000	500	369.620.000	500	419.620.000	500	469.620.000	500	519.620.000	
Pelayanan Dukungan Psikososial		Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan	Orang	2120	500	500	10.000.000	500	10.000.000	500	10.000.000	500	10.000.000	500	10.000.000	

NAMA BIDANG URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
				Th. 2024	Th. 2025	Th. 2026		Th. 2027		Th. 2028		Th. 2029		Th. 2030		
						Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	5	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)
		Kabupaten/Kota														
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Terwujudnya Pemeliharaan taman makam pahlawan	Indikator Program :Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	persen	100	100	100	57.360.00 0	100	253.388.0 00	100	270.911.0 00	100	289.844.00 0	100	310.316.000	
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Terselenggar anya Rehabilitasi sarana dan prasarana Taman makam Pahlawan	Indikator Kegiatan : Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	persen	100	100	100	57.360.00 0	100	253.388.0 00	100	270.911.0 00	100	289.844.00 0	100	310.316.000	
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	0	0	1	160.500.0 00	1	171.735.0 00	1	183.750.00 0	1	196.612.500	

NAMA BIDANG URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
				Th. 2024	Th. 2025	Th. 2026		Th. 2027		Th. 2028		Th. 2029		Th. 2030		
						Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	5	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaan pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kot a	Makam	1	1	1	57.360.00 0	1	92.888.00 0	1	99.176.00 0	1	106.094.00 0	1	113.703.500	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							2.609.665. 000		2.769.145 .000		2.821.801 .000		2.876.821.0 00		2.934.350.00 0	
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Meningkatny a pemakaian kontrasepi modern (Modern Contraceptiv e Prevalence Rate/mCPR)	Indikator Program :Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) (IKK)	persen	64,41	64,48	64,55	142.580.0 00	64,6 2	179.400.0 00	64,69	185.400.0 00	64,76	191.900.00 0	64,83	198.900.000	
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya kampung keluarga berkualitas Mandiri	Indikator Kegiatan : Persentase kampung keluarga berkualitas Mandiri	persen	37	38,3	40,8	142.580.0 00	42,6	179.400.0 00	44	185.400.0 00	45	191.900.00 0	45,8	198.900.000	

NAMA BIDANG URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	SATUA N	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
				Th. 2024	Th. 2025	Th. 2026		Th. 2027		Th. 2028		Th. 2029		Th. 2030		
						Targ et	Pagu	Tar get	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	5	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)
Penyediaan Data dan Informasi Keluarga		Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	Dokumen	1	1	1	50.180.000	1	87.000.000	1	93.000.000	1	99.500.000	1	106.500.000	
Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga		Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Laporan	27	27	1	63.600.000	1	63.600.000	1	63.600.000	1	63.600.000	1	63.600.000	
Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB		Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Dokumen	8	8	8	28.800.000	8	28.800.000	8	28.800.000	8	28.800.000	8	28.800.000	
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Terwujudnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmeetneed)	Indikator Program :Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmeetneed) (IKK)	persen	8,48	9,5	9,25	778.865.000	9	841.885.000	8,75	868.541.000	8,5	897.061.000	8,4	927.590.000	

NAMA BIDANG URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
				Th. 2024	Th. 2025	Th. 2026		Th. 2027		Th. 2028		Th. 2029		Th. 2030		
						Targ et	Pagu	Tar get	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	5	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Tersedianya dokumen Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Indikator Kegiatan : Persentase ketersediaan dokumen Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	persen	n/a	n/a	100	176.000.000	100	184.120.000	100	192.800.000	100	202.096.000	100	202.096.000	
Pengendalian Program KKBPK		Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Laporan	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana		Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan	Laporan	16	16	4	60.000.000	4	60.000.000	4	60.000.000	4	60.000.000	4	60.000.000	

NAMA BIDANG URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
				Th. 2024	Th. 2025	Th. 2026		Th. 2027		Th. 2028		Th. 2029		Th. 2030		
						Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	5	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)
		Keluarga Berencana)														
Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)		Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Laporan	48	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NAMA BIDANG URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
				Th. 2024	Th. 2025	Th. 2026		Th. 2027		Th. 2028		Th. 2029		Th. 2030		
						Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	5	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)
Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang		Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Dokumen	1	1	1	116.000.000	1	124.120.000	1	132.800.000	1	142.096.000	1	142.096.000	
Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja		Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders	Organisasi	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

NAMA BIDANG URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
				Th. 2024	Th. 2025	Th. 2026		Th. 2027		Th. 2028		Th. 2029		Th. 2030		
						Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	5	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)
		dan Mitra Kerja														
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi Menurut Alat/Cara KB Modern (Demand Satisfied)	Indikator Kegiatan : Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi Menurut Alat/Cara KB Modern (Demand Satisfied)	persen	83,5	84,4	86	602.865.000	87,6	657.765.000	88,8	675.741.000	89,8	694.965.000	90	725.494.000	
Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

NAMA BIDANG URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	SATUA N	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
				Th. 2024	Th. 2025	Th. 2026		Th. 2027		Th. 2028		Th. 2029		Th. 2030		
						Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	5	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)
Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Orang	1026	1137	1044	400.965.000	1044	400.965.000	1044	400.965.000	1044	400.965.000	1044	400.965.000	
Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak		Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Laporan	1	1	1	201.900.000	1	256.800.000	1	274.776.000	1	294.000.000	1	324.529.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Terwujudnya Angka kelahiran pada Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Indikator Program :Persentase Angka kelahiran pada Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	persen	9,5	8,3	7,4	1.688.220.000	6,6	1.747.860.000	5,9	1.767.860.000	5,3	1.787.860.000	4,9	1.807.860.000	
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan	Tercapainya kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan	Indikator kegiatan : Persentase kelompok kegiatan ketahanan dan	persen	0	0	100	20.260.000	100	20.260.000	100	20.260.000	100	20.260.000	100	20.260.000	

NAMA BIDANG URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
				Th. 2024	Th. 2025	Th. 2026		Th. 2027		Th. 2028		Th. 2029		Th. 2030		
						Targ et	Pagu	Tar get	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	5	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)
Kesejahteraan Keluarga	n keluarga yang memberikan pembinaan keluarga	kesejahteraan keluarga yang memberikan pembinaan keluarga														
Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)		Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	kelompo k	0	0	6	20.260.00 0	6	20.260.00 0	6	20.260.00 0	6	20.260.000	6	20.260.000	
Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui	Terwujudnya pengasuhan orangtua/kelu arga yang memiliki remaja	Indikator Kegiatan : Indeks Pengasuhan Keluarga yang memilki remaja	indeks	87	87,8	88,8	1.667.960. 000	89,5	1.727.600 .000	90,2	1.747.600 .000	90,9	1.767.600.0 00	91,5	1.787.600.00 0	

NAMA BIDANG URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	SATUA N	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
				Th. 2024	Th. 2025	Th. 2026		Th. 2027		Th. 2028		Th. 2029		Th. 2030		
						Targ et	Pagu	Tar get	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	5	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)
Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga																
Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)		Indikator Sub Kegiatan : Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Cal on PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran , Baduta/Balita)	Laporan	10	10	10	354.000.0 00	10	354.000.0 00	10	354.000.0 00	10	354.000.00 0	10	354.000.000	
Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)		Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Cal on PUS, Ibu Hamil, Pasca	Laporan	11	11	10	1.203.600. 000	10	1.203.600 .000	10	1.203.600 .000	10	1.203.600.0 00	10	1.203.600.00 0	

NAMA BIDANG URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
				Th. 2024	Th. 2025	Th. 2026		Th. 2027		Th. 2028		Th. 2029		Th. 2030		
						Targ et	Pagu	Tar get	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	5	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)
		salin/kelahiran , Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan														
Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga		Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	Laporan	5	5	5	110.360.0 00	5	170.000.0 00	5	190.000.0 00	5	210.000.00 0	5	230.000.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							3.599.143. 000		3.985.107 .000		4.160.707 .000		4.336.207.0 00		4.518.507.00 0	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Tercapainya layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan yang	Indikator Program :Persentase keselarasan perencanaan, kinerja evaluasi dan kinerja keuangan perangkat daerah	persen	100	100	100	2.584.452. 000	100	2.731.567 .000	100	2.831.567 .000	100	2.931.567.0 00	100	3.038.367.00 0	

NAMA BIDANG URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
				Th. 2024	Th. 2025	Th. 2026		Th. 2027		Th. 2028		Th. 2029		Th. 2030		
						Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	5	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)
	akuntabel dan sesuai ketentuan peraturan perundangan															
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang akuntabel dan sesuai ketentuan peraturan perundangan	Indikator Kegiatan : Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran , dan evaluasi kinerja perangkat daerah	persen	100	100	100	659.432.0 00	100	663.400.0 00	100	663.400.0 00	100	663.400.00 0	100	874.200.000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokume n	2	3	2	3.132.000	2	3.200.000	2	3.200.000	2	3.200.000	3	10.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Dokume n	2	2	2	5.720.000	2	5.750.000	2	5.750.000	2	5.750.000	2	5.750.000	

NAMA BIDANG URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
				Th. 2024	Th. 2025	Th. 2026		Th. 2027		Th. 2028		Th. 2029		Th. 2030		
						Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	5	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)
		Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokume n	15	15	15	12.420.00 0	15	12.450.00 0	15	12.450.00 0	15	12.450.000	15	12.450.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya administrasi keuangan daerah yang akuntabel dan sesuai ketentuan peraturan perundangan	Indikator Kegiatan : Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	persen	100	100	100	76.938.08 3.000	100	81.347.71 0.000	100	84.347.71 0.000	100	87.347.710. 000	100	90.347.710.0 00	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang /bulan	19	20	20	2.520.497. 000	20	2.667.467 .000	20	2.767.467 .000	20	2.867.467.0 00	20	2.967.467.00 0	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikas i Keuangan SKPD		Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Penatausahaa n dan Pengujian/Veri	Dokume n	12	12	12	39.300.00 0	12	39.300.00 0	12	39.300.00 0	12	39.300.000	12	39.300.000	

NAMA BIDANG URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
				Th. 2024	Th. 2025	Th. 2026		Th. 2027		Th. 2028		Th. 2029		Th. 2030		
						Targ et	Pagu	Tar get	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	5	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)
		fikasi Keuangan SKPD														
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokume n	1	1	1	3.383.000	1	3.400.000	1	3.400.000	1	3.400.000	1	3.400.000	
	Tercapainya layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan yang akuntabel dan sesuai ketentuan peraturan perundangan	Indikator Program :Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100	100	100	652.441.0 00	100	721.600.0 00	100	732.100.0 00	100	742.600.00 0	100	753.100.000	

NAMA BIDANG URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
				Th. 2024	Th. 2025	Th. 2026		Th. 2027		Th. 2028		Th. 2029		Th. 2030		
						Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	5	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terwujudnya administrasi kepegawaian perangkat daerah yang akurat dan sesuai ketentuan peraturan perundangan	Indikator Kegiatan : Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	persen	100	100		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya administrasi umum perangkat daerah yang tepat waktu dan sesuai ketentuan	Indikator Kegiatan : Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	persen	100	100	100	7.923.000.000	100	9.556.900.000	100	9.866.900.000	100	10.176.900.000	100	10.486.900.000	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	4	7.300.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	

NAMA BIDANG URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
				Th. 2024	Th. 2025	Th. 2026		Th. 2027		Th. 2028		Th. 2029		Th. 2030		
						Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	5	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	4	60.000.00 0	4	75.000.00 0	4	75.000.00 0	4	75.000.000	4	75.000.000	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	4	4	10.000.00 0	4	15.000.00 0	4	15.000.00 0	4	15.000.000	4	15.000.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	4	75.000.00 0	4	85.000.00 0	4	85.000.00 0	4	85.000.000	4	85.000.000	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	4	4	7.500.000	4	8.500.000	4	8.500.000	4	8.500.000	4	8.500.000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Dokumen	1	1	1	1.000.000	1	1.100.000	1	1.100.000	1	1.100.000	1	1.100.000	

NAMA BIDANG URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
				Th. 2024	Th. 2025	Th. 2026		Th. 2027		Th. 2028		Th. 2029		Th. 2030		
						Targ et	Pagu	Tar get	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	5	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)
		yang Disediakan														
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	150	150	150	100.000.0 00	150	120.000.0 00	150	130.000.0 00	150	140.000.00 0	150	150.000.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang sesuai ketentuan	Indikator Kegiatan : Persentase ketercapaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100	100	100	11.391.15 0.000	100	11.847.50 0.000	100	11.862.00 0.000	100	11.876.500. 000	100	11.891.000.0 00	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	4	4	1.000.000	4	4.500.000	4	4.500.000	4	4.500.000	4	4.500.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	Laporan	12	12	12	177.561.0 00	12	185.000.0 00	12	185.000.0 00	12	185.000.00 0	12	185.000.000	

NAMA BIDANG URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
				Th. 2024	Th. 2025	Th. 2026		Th. 2027		Th. 2028		Th. 2029		Th. 2030		
						Targ et	Pagu	Tar get	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	5	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)
		Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan														
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	12	208.080.0 00	12	212.500.0 00	12	213.000.0 00	12	213.500.0 0	12	214.000.000	
	Tercapainya pengelolaan barang milik daerah yang akurat dan sesuai ketentuan peraturan perundangan	Indikator Program :Persentase pengadaan/pe meliharaan barang milik daerah	100	100	100	100	362.250.0 00	100	531.940.0 00	100	597.040.0 00	100	662.040.0 0	100	727.040.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggar anya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang akuntabel dan sesuai ketentuan perundangan	Indikator Kegiatan : Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persen	100	100	100	10.717.50 0.000	100	15.578.20 0.000	100	17.511.20 0.000	100	19.441.200. 000	100	21.371.200.0 00	

NAMA BIDANG URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET.
				Th. 2024	Th. 2025	Th. 2026		Th. 2027		Th. 2028		Th. 2029		Th. 2030		
						Targ et	Pagu	Tar get	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	5	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	67	69	67	237.250.000	67	286.940.000	67	337.040.000	67	387.040.000	67	437.040.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	8	8	8	75.000.000	8	190.000.000	8	200.000.000	8	210.000.000	8	220.000.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	43	63	65	50.000.000	65	55.000.000	65	60.000.000	65	65.000.000	65	70.000.000	

Sumber : Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Agustus 2025

4.3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Pada Renstra DinsosP2KB tahun 2025 – 2029 tidak terdapat program, kegiatan maupun sub kegiatan yang mendukung program prioritas Pembangunan Daerah. Namun seluruh Program, Kegiatan dan sub Kegiatan pada renstra DinsosP2KB Tahun 2025 – 2029 mendukung misi Walikota dan Wakil Walikota Kota Pekalongan periode 2025 – 2029 pada misi ke 5 yaitu Peningkatan layanan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 4. 2 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO.	PROGRAM PRIORITAS	OUTCAME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
N I H I L				

Sumber : Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Agustus 2025

4.4. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Utama Pembangunan

Tabel 4. 3 Indikator Utama Pembangunan (IUP) DinsosP2KB

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN							KET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indeks Pembangunan Keluarga (ibangga) / IUP	Indeks Pembangunan Keluarga (ibangga) / IUP	65,92	65,91 -	66,68 -	67,46 -	68,23 -	69,00 -	69,77 -	
				65,92	66,71	67,49	68,28	69,06	69,85	

Sumber : Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Agustus 2025

4.5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Utama (IKU) DinsosP2KB

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	persen	100	100	100	100	100	100	
2	Jumlah Keluarga Miskin Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	keluarga	230	230	230	230	230	230	
3	Nilai SAKIP OPD	angka	75,92	75,94	75,96	75,98	76,00	76,02	
4	Total Fertility Rate	angka	2,18	2,18	2,17	2,17	2,16	2,16	

Sumber : Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Agustus 2025

4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Tabel 4. 5 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	persen	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	persen	100	100	100	100	100	100	

3	TFR (Angka Kelahiran Total)	angka	2,18	2,18	2,17	2,17	2,16	2,16	
4	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	persen	64,48	64,55	64,62	64,69	64,76	64,83	
5	Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (<i>unmetneed</i> KB)	persen	9,50	9,25	9,00	8,75	8,50	8,40	

Sumber : Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Agustus 2025

4.7 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Tabel 4. 6 Indikator Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) DinsosP2KB

NO	JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Capaian 2024	TARGET TAHUNAN						KET.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Yang Harus Dilayani	Orang	2120	480	480	480	480	480	480	
		Penyediaan permakanaan	Orang	2120	480	480	480	480	480	480	
		Penyediaan sandang	Orang	2120	480	480	480	480	480	480	
		Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Orang	3	2	100	100	100	100	100	
		Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	1070	9	50	50	50	50	50	
		Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	2120	480	480	480	480	480	480	
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	Jumlah Yang Harus Dilayani	Orang	32	3	3	3	3	3	3	
		Layanan data dan pengaduan	Orang	11	1	1	1	1	1	1	
		Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	21	1	1	1	1	1	1	
		Penyediaan permakanaan	Orang	32	3	3	3	3	3	3	
		Penyediaan sandang	Orang	32	3	3	3	3	3	3	
		Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	32	3	3	3	3	3	3	
		Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	32	3	3	3	3	3	3	
		Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	Orang	29	1	1	1	1	1	1	

NO	JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Capaian 2024	TARGET TAHUNAN						KET.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	10	1	1	1	1	1	1	
		Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	32	3	3	3	3	3	3	
		Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	32	3	3	3	3	3	3	
		Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	29	1	1	1	1	1	1	
		Layanan rujukan	Orang	0	1	1	1	1	1	1	
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar di Luar Panti	Jumlah Yang Harus Dilayani	Orang	39	10	10	10	10	10	10	
		Layanan data dan pengaduan	Orang	22	3	3	3	3	3	3	
		Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	16	5	5	5	5	5	5	
		Penyediaan permakanan	Orang	39	10	10	10	10	10	10	
		Penyediaan sandang	Orang	39	10	10	10	10	10	10	
		Penyediaan alat bantu	Orang	12	3	3	3	3	3	3	
		Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	39	10	10	10	10	10	10	
		Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	39	10	10	10	10	10	10	
		Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlanjar	Orang	8	3	3	3	3	3	3	
		Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	13	3	3	3	3	3	3	
	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	39	10	10	10	10	10	10		

NO	JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Capaian 2024	TARGET TAHUNAN						KET.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	39	10	10	10	10	10	10	
		Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	8	4	5	5	5	5	5	
		Layanan rujukan	Orang	11	3	3	3	3	3	3	
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	Jumlah Yang Harus Dilayani	Orang	26	4	4	4	4	4	4	
		Layanan data dan pengaduan	Orang	1	1	1	1	1	1	1	
		Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	25	1	1	1	1	1	1	
		Penyediaan permakanan	Orang	26	4	4	4	4	4	4	
		Penyediaan sandang	Orang	26	4	4	4	4	4	4	
		Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	26	4	4	4	4	4	4	
		Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	26	4	4	4	4	4	4	
		Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	Orang	26	4	4	4	4	4	4	
		Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	4	1	2	2	2	2	2	
		Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	26	4	4	4	4	4	4	
		Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	26	4	4	4	4	4	4	
		Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	26	4	4	4	4	4	4	
		Layanan rujukan	Orang	0	1	1	1	1	1	1	

NO	JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Capaian 2024	TARGET TAHUNAN						KET.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Jumlah Yang Harus Dilayani	orang	207	65	65	65	65	65	65	
		Layanan data dan pengaduan	orang	115	10	10	10	10	10	10	
		Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	orang	90	10	10	10	10	10	10	
		Penyediaan permakanan	orang	207	65	65	65	65	65	65	
		Penyediaan sandang	orang	207	65	65	65	65	65	65	
		Penyediaan alat bantu	orang	6	1	1	1	1	1	1	
		Penyediaan perbekalan kesehatan	orang	207	65	65	65	65	65	65	
		Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	orang	207	65	65	65	65	65	65	
		Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	orang	95	5	5	5	5	5	5	
		Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	orang	99	3	3	3	3	3	3	
		Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	orang	207	65	65	65	65	65	65	
		Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	orang	207	65	65	65	65	65	65	
		Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	orang	95	5	5	5	5	5	5	
Layanan rujukan	orang	4	5	10	10	10	10	10			

Sumber : Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Agustus 2025

4.8 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 yang mendukung Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi

Tabel 4. 7 Indikator yang mendukung Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET TAHUN					KET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(10)
1	IKESOS (Indeks Kesejahteraan Sosial)	angka	-	62	63	64	65	66	67	Rilis data dari Kemensos
2	Indeks Lansia Berdaya	angka	-	58,4	58,9	59,3	59,7	60,1	60,5	Rilis data dari Kemendukba ngga / BKKBN
3	Persentase KB Pasca Persalinan (KBPP)	persen	39,60	54,44	54,56	54,67	54,79	54,91	55,02	Rilis data dari Kemendukba ngga / BKKBN

Sumber : Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Agustus 2025

BAB V PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (Dinsos P2KB) Kota Pekalongan Tahun 2025–2029 merupakan langkah strategis dalam menghadapi tantangan kesejahteraan sosial dan pengendalian penduduk di Kota Pekalongan. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan program yang lebih terarah, efektif, serta selaras dengan kebijakan nasional dan kebutuhan masyarakat.

Namun, dalam implementasi Renstra ini, terdapat beberapa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam pelaksanaan program maupun dalam menghadapi keterbatasan anggaran. Prioritas Program – Mengutamakan program yang memiliki dampak langsung dan berkelanjutan bagi kesejahteraan sosial dan pengendalian penduduk, dengan fokus pada kelompok rentan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Efisiensi dan Optimalisasi Sumber Daya – Memastikan penggunaan anggaran yang efisien dan mengoptimalkan berbagai sumber pendanaan, termasuk kerja sama dengan sektor swasta, CSR, serta kolaborasi dengan organisasi masyarakat. Fleksibilitas dan Adaptasi Kebijakan – Menyesuaikan kebijakan dan program dengan kondisi sosial-ekonomi yang dinamis, serta memastikan adanya langkah mitigasi dalam menghadapi kendala anggaran atau perubahan regulasi. Penguatan Kolaborasi – Meningkatkan sinergi dengan OPD terkait, pemerintah pusat, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat guna memperkuat implementasi program dan menciptakan solusi inovatif terhadap keterbatasan sumber daya. Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan – Mengembangkan sistem pemantauan dan evaluasi yang berbasis data agar pelaksanaan program dapat dikendalikan dengan baik, serta melakukan perbaikan berkelanjutan sesuai dengan kondisi di lapangan.

Untuk memastikan keberhasilan implementasi Renstra 2025–2029, kaidah pelaksanaan yang diterapkan mencakup prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap program yang dijalankan. Pelaksanaan program harus berorientasi pada hasil yang nyata serta mengutamakan pemanfaatan sumber daya secara optimal. Sebagai tindak lanjut, akan dilakukan penyusunan program kerja tahunan yang selaras dengan target dan indikator kinerja, penguatan kapasitas SDM agar lebih profesional dan responsif, serta strategi pendanaan alternatif untuk

mengatasi keterbatasan anggaran. Selain itu, evaluasi berkala akan dilakukan guna memastikan program berjalan sesuai rencana serta memungkinkan penyesuaian terhadap dinamika sosial dan ekonomi yang berkembang, sehingga kesejahteraan sosial dan pengendalian penduduk di Kota Pekalongan dapat tercapai secara berkelanjutan.

Pekalongan, 19 September 2025
Kepala Dinas Sosial, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
Kota Pekalongan



YOS ROSYIDI S.I.P., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19660516 198603 1 007